BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah Penulis bahas pada Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penganggaran partisipatif pada Program kegiatan Musrenbang pada BAPPEDA Kota Bandung, dari kegiatan perencanaan pembangunan bagi masyarakat yang ada di Kota Bandung secara sistematis dapat mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah Kota Bandung.
2. Dengan adanya Evaluasi dari berbagai aduan masyarakat kepada BAPEDDA mampu dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan sehingga bisa memberikan pencapaian yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandung.
3. Tugas Pokok sub Bagian Program, khususnya pada kegiatan Musrenbang Kota Bandung dalam penyusunan RKPD harus dapat menunjang sehingga pelaksana Musrenbang menjadi lebih baik bermusyawarah dalam perencanaan pembangunan kepentingan daerah.

4. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan Penganggaran Partisipatif pada bidang Musrenbang di BAPPEDA Kota Bandung mampu teratasi dengan baik dengan satu sama lain antara BAPEDDA dan Masyarakat Kota Bandung mampu berpartisipatif dalam segala hal selama berjalannya Musrenbang.

4.2 Saran

Saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Sarana penunjang seperti komputer lengkap, maupun alat kantor lainnya merupakan hal yang perlu direalisasikan mengingat banyaknya pekerjaan rutin yang harus diselesaikan tepat pada waktunya sehingga tujuan dari sistem yang dibuat yaitu tercapainya keefektifan dan keefisienan dapat diwujudkan.
2. Peningkatan sumber daya manusia agar mengimbangi sarana yang ada di BAPEDDA agar dapat saling mendukung guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif.
3. Perlu adanya Dasar Hukum yang tetap untuk mengatur Kriteria Usulan Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD, agar bisa efektif untuk hasil pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terutama dalam hal penetapan Usulan Musrenbang yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD.